

**SISTEM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PROYEK APBN TAHUN 2006 PADA BAPPEDA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

T E S I S

Disusun oleh :

**Nama : Triwibowo
NIMP : 051801015
Program Studi : Magister Administrasi Publik**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA)
MEDAN 2007**

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI
PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA)**

LEMBAR PERSETUJUAN

**JUDUL TESIS : SISTEM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN PROYEK APBN TAHUN 2006 PADA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

N A M A : TRIWIBOWO

NIMP : 051801015

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

DRS. MURBANTO SINAGA, MA

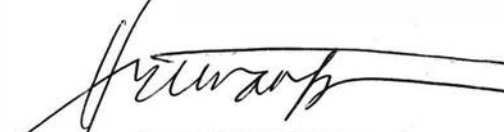
DRS. AGUS SURYADI, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur,



DRS. KARIONO, MA



DRS. HERI KUSMANTO, MA

Program Magister Administrasi Publik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, serta berkat taufik dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan

Tesis ini yang berjudul : **"SISTEM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROYEK APBN TAHUN 2006 PADA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA"**

Penulisan ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses Perkuliahan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa data-data dan informasi, serta berbagai dukungan baik moril maupun materil dari Instansi-instansi dilingkungan Provinsi Sumatera Utara khususnya kepada Pegawai Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis memberikan informasi dan data yang akurat, dalam menyelesaikan Tesis ini, tidak lupa juga diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Drs. Murbanto Sinaga, MA** (Pembimbing I) dan **Drs. Agus Suryadi, M.Si** (Pembimbing II) yang dengan segala kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberi petunjuk, pengarahan dan koreksi selama masa bimbingan, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis.



Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area
2. Drs. Kariono, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Administrasi Publik
3. Staf/Karyawan Kantor/Biro Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Segenap Dosen Pengajar, pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal, ilmu baik secara teoritis maupun praktis kepada Penulis sewaktu masa perkuliahan
5. Bapak Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan seluruh Staf Bappeda Provinsi Sumatera Utara
6. Rekan-rekan peserta Program Studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan moral yang sangat berharga bagi saya

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Istri tercinta (**Sri Agustina**) . dan Ananda tersayang (**Elfriza Safhira** dan **Elfrian Prayoga**) beserta kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus selama penulis mengikuti Program Magister Administrasi Publik ini

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari yang sempurna, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan Tesis ini dimasa yang akan datang.

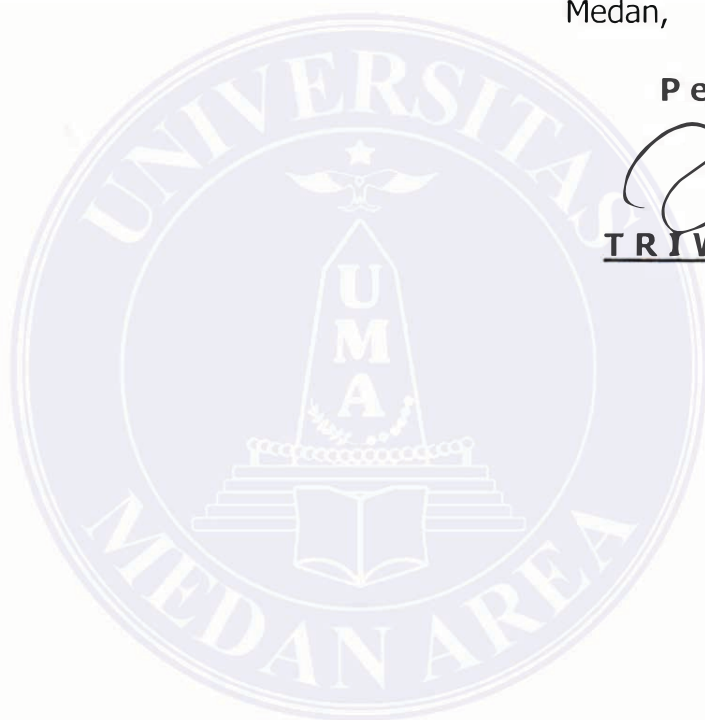
Akhirnya, penulis mengharapkan dengan kerendahan hati bahwa Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait yang membutuhkannya, dan untuk penulis teruskan dapat berkarya sebagai bakti kepada orang tua, keluarga dan bangsa

Medan, Mei 2007

Penulis,



TRIWIBOWO



ABSTRAK

Triwibowo, 2007, Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN Tahun 2006 pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dibawah Bimbingann Drs. Murbanto Sinaga, MA dan Drs. Agus Suryadi, M.Si terdiri dari :96 Halaman, 6 Bab, 11 Lampiran, dll

Dalam konsep kebijaksanaan pembangunan nasional dinyatakan bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran serta lebih berhasil dan berdayaguna sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian dapat terselenggara dengan baik, apabila sistem dapat menyajikan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara terus menerus dan tepat waktu. Oleh karena pentingnya pengendalian dalam memberhasilkan pelaksanaan proyek, di dalam Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP-102/MK.2/2002 dan Nomor Kep-292/M.PPN/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan, telah menetapkan bahwa Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui keadaan/perkembangan fisik proyek. Berdasarkan data bahwa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 mendapat kucuran dana dari APBN Pusat sebesar Rp. 6.127.066.566.117,- dari data tersebut masih ada dijumpai Instansi pemakai anggaran baik dana dekonsentrasi ataupun tugas pembantuan dilingkungan Pemprov yang dalam penyampaian laporan pelaksanaan proyek APBN mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan, dan juga dalam pengisian format pelaporan masih beragam, untuk itu perlu diketahui apa penyebab faktor-faktor keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan proyek APBN Tahun 2006, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan harus diperbaiki agar sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan proyek APBN Tahun 2006 dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam Penelitian Sistem Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN Tahun 2006 pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara ini yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu untuk mengetahui sampai sejauhmana prosedur-prosedur yang dilaksanakan dalam sistem, pengendalian, evaluasi dan pelaporan proyek APBN Tahun 2006, dan dilakukan Identifikasi faktor-faktor keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan proyek APBN tahun 2006, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan sistem, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

proyek APBN yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil dari mekanisme penyampaian laporan bahwa keterlambatan penyampaian laporan ini disebabkan karena ; 1) Adanya DIPA yang direvisi kembali, karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada 2) Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, membuat para pengelola proyek cenderung kurang mematuhi peraturan karena dianggap peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi, 3) Masih adanya pengelola proyek yang belum memahami arti pentingnya pelaporan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan kurang pemahamnya sumber daya manusia dalam mengelola proyek dan 4) Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada yang berpendapat bahwa otonomi daerah itu pada dasarnya kewenangan untuk Pertimbangan lain bahwa sumber dana yang mereka terima adalah berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan tidak dari Pemerintah Provinsi (APBD), sehingga ada pemikiran bahwa untuk tidak memberikan laporan

Agar Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN Tahun 2006 dapat berjalan dengan baik, efektif sesuai yang diharapkan, disarankan : 1) Kepada Instansi Pemprov, khususnya Bappedas untuk segera menyurati Pemerintah Pusat agar segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, seperti yang telah dituangkan didalam UU Nomor 32 tahun 2004, Pasal 154, 2. Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, maka Sistem pengendalian evaluasi dan pelaporan Proyek APBN Tahun 2006 perlu penyempurnaan antara lain format pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang mudah diisi, jadwal penyampaian laporan yang disepakati oleh semua pihak, dan diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil tindakan tegas kepada para Pengelola Proyek yang kurang patuh dalam penyampaian laporan Proyek yaitu dengan memotong anggaran pada tahun yang akan datang. 3) Untuk meningkatkan SDM, baik jumlah maupun kapasitasnya, maka pemerintah perlu meningkatkan kesadaran berbagai pihak akan pentingnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan, sehingga pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, 4) Tidak perlu membuat peraturan baru kalau peraturan lama masih bisa digunakan dengan baik, cukup disesuaikan dengan perkembangan saja dan agar lebih efektifnya Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN, disarankan kepada Pemerintah Pusat perlu adanya keseragaman format (format yang baku) yaitu dengan didukung oleh sistem database yang benar dan adanya peraturan serta mekanisme yang jelas dalam penyampaian laporan, agar pada tahun-tahun yang akan datang pelaporan di Provinsi Sumatera Utara lebih terarah

DAFTA ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Pernyataan	vi
A b s t r a k	vii
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1 - 3
1.2 Perumusan Masalah	4 - 4
1.3 Tujuan Penelitian	4 - 5
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	5 - 5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5 - 6
BAB II : KAJIAN TEORITIS	7
2.1 Kerangka Teoritis	7 - 20
2.2 Kerangka Konseptual	21 -22
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Metode Penelitian	23 - 23
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	23 - 24
3.3 Sumber dan Jenis Data	24 - 25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25 - 25
3.5 Teknik Analisis Data	25 - 26
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	26 - 27
3.7 Data yang dibutuhkan	27 - 27
BAB IV : GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA	28
4.1 Deskripsi Singkat Bappeda Prov. Sumatera Utara.	28 - 28
4.2 Visi dan Misi Bappeda Prov. Sumatera Utara	29 - 31
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara	31 - 62
4.4 Sumber Daya Manusia	63 - 64
4.5 Proyek APBN Tahun 2006 di Provinsi Sumatera. Utara	64 - 64
4.6 Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pelaporan - Proyek APBN Tahun 2006	64 - 77

BAB V	: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	78
	5.1 Identifikasi dan Mekanisme Penyampaian Laporan	81 - 82
	5.2 Identifikasi dari Pengisian Format Pelaporan	82 - 91
BAB VI	: KESIMPULAN DAN SARAN	92
	6.1 Kesimpulan	92 - 93
	6.2 Saran	93 - 94
DAFTAR PUSTAKA		95 - 96
DAFTAR LAMPIRAN :		
LAMPIRAN		



BAB. I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan menuju kearah perbaikan dan kemajuan dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam proses pembangunan itu sendiri acap kali timbul masalah dan hambatan yang merupakan tantangan karena apa yang direncanakan belum tentu sesuai dengan hasil yang akan dicapai.

Firman dkk (1982:6) menyatakan bahwa pembangunan itu adalah suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ia dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan modal dengan mempertimbangkan keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi dikarenakan banyak sekali keterbatasan. Dengan kata lain bahwa hakekat dari pembangunan itu adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Dalam konsep dan kebijaksanaan pembangunan nasional dinyatakan bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan,

sangatlah diperlukan suatu pengendalian dan evaluasi pelaporan proyek-proyek pembangunan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran serta lebih berhasil dan berdayaguna sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Pengendalian dapat terselenggara dengan baik, apabila Sistem pelaporan dapat menyajikan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara terus menerus dan tepat waktu. Dengan demikian dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan proyek baik sasaran fisik dan keuangannya, maupun penyimpangan atau permasalahan yang terjadi sehingga langkah-langkah koreksi ataupun tindakan penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan sedini mungkin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 28 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkan bahwa segala pengendalian rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD, dan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan masing-masing instansi tersebut akan dihimpun, dianalisis, dikoordinasikan dan dinilai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Bintoro Tjokroamidjojo (1992:196) menyatakan bahwa untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan di Sumatera Utara perlu kiranya diadakan sistem pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan proyek Pembangunan yang bertujuan untuk :

Basu Swastha dan Ibnu Suketjo, 1993, Pengantar Bisnis Modern, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2001, Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam Perspektif Otda, Medan.

Baharuddin Aritonang, Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Pustaka Pergaulan

Bappenas, 2004, Undang - undang 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

Bappedasu, 2006, Laporan Konsolidasi Proyek - proyek Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Medan

Sekretariat Jenderal Dep. Dalam Negeri, 2003, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendukung Pelaksanaan Dekonsentrasi, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dalam Perangkat Daerah,

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-433.K/2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Medan

Perraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara, Medan

Basu Swastha dan Ibnu Suketjo, 1993, Pengengantar Bisnis Modern, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2001, Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam Perspektif Otda, Medan.

Baharuddin Aritonang, Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Pustaka Pergaulan

Bappenas, 2004, Undang - undang 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

Bappedasu, 2006, Laporan Konsolidasi Proyek - proyek Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Medan

Sekretariat Jenderal Dep. Dalam Negeri, 2003, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendukung Pelaksanaan Dekonsentrasi, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dalam Perangkat Daerah,

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-433.K/2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Medan

Perraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara, Medan